

**Peningkatan Pemahaman Peran dan Nilai-Nilai Perjuangan Tokoh Nasional Bung Karno Dan Hatta Sebagai Proklamator Bagi Guru Sejarah Sma Se-Kabupaten Polewali Mandar**

**Amirullah<sup>1</sup>, Muh.Saleh Madjid<sup>2</sup>, Ahmadin<sup>3</sup>**

---

**Keywords :**

Peningkatan Pemahaman Peran dan Nilai-Nilai Perjuangan

**Abstrak.** Luaran yang dihasilkan melalui program kemitraan masyarakat (PKM) ini adalah guru-guru mata pelajaran Sejarah SMA di Kabupaten Polewali Mandar dapat meningkatkan penguasaan kompetensi dasar tentang Peningkatan Pemahaman Peran Dan Nilai-Nilai Perjuangan Tokoh Nasional Bung Karno Dan Hatta Sebagai Proklamator Bagi Guru Sejarah Sma Se-Kabupaten Polewali Mandar.

Salah satu prinsip pengembangan profesi guru adalah kemandirian, dimana setiap guru secara terus menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan, sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya.

Kompetensi inti pada PKM ini untuk ditingkatkan adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru, antara lain kemampuan menguasai bidang ilmu, sumber bahan ajaran, baik dari segi substansi dan metodologi bidang ilmu (disciplinary content knowledge), dan pengemasan bidang ilmu menjadi bahan ajar dalam kurikulum (pedagogical content knowledge).

**Correspondensi Author**

Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Makassar  
Jl. Mangga 1 Pao-Pao Paccinongan  
Gowa  
Email:amirullah8505@unm.ac.id

**History Artikel**

*Received:* 11-september-2019;

*Reviewed:* 15-desember-2019

*Revised:* 21-desember-2019

*Accepted:* 12-januari-2020

*Published:* 11-Februari-2020

---



## PENDAHULUAN

Kedudukan guru dalam sistem persekolahan menempati posisi strategis, berada di garis paling depan, mengajar di depan kelas, menghadapi dan mengatasi secara langsung berbagai persoalan yang terjadi dengan peserta didik di kelas dan di sekolah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Keberhasilan peserta didik menguasai pengetahuan dan mengasah ketajaman keterampilan, bergantung kepada guru dalam memberikan arahan, tuntunan, bimbingan, pelatihan dan keteladanan yang baik. (Irwansyah, I., Mario, M., & Tamrin, S, 2019). Dengan demikian guru bukan hanya menjadi ujung tombak pendidikan di sekolah, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan pendidikan secara nasional. Hasil studi Hattie (2003) menjelaskan bahwa faktor guru mempunyai sumbangan besar terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan pencapaian hasil belajar peserta didik di sekolah (Kemneterian Pendidikan Nasional Dirjen Dikti, 2011:11)

Jabatan profesional dalam implementasinya mutlak memerlukan kompetensi, yakni seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Untuk profesi guru, kompetensi inti yang harus dimiliki ditegaskan pada Pasal 10 ayat (1) UU RI NO. 14 Tahun 2005, bahwa “kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.

Negara melalui pemerintah sejak tahun 2005 mengakui secara legal formal eksistensi jabatan guru sebagai jabatan profesional. Pengakuan ini ditegaskan pada Pasal 1 angka 1 UU RI NO.14 Tahun 2005

Jo. PP No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Dalam Pasal 1 angka 4 UU RI NO.14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa “profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.

Jabatan profesi guru merupakan jabatan yang sangat strategis dalam rangka pembangunan bangsa. Menurut Moh. Uzer Usman (2001:7) “Potret dan wajah diri bangsa di masa depan tercermin dari potret diri para guru masa kini (Moh. Uzer Usman, 2001:7). Kedudukan strategis guru tidak hanya dalam skala makro, tetapi juga dalam skala mikro, yakni dalam kegiatan dan proses pembelajaran.

Sehubungan dengan itu, maka upaya peningkatan kompetensi profesional, khususnya dalam hal peningkatan penguasaan materi bidang studi menjadi sangat urgen untuk dilakukan, baik dalam bentuk formal, maupun informal. (Najamuddin, N., & Bustan, B., 2019). Oleh karena itu tim pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembiayaan PNBPF Fakultas Ilmu sosial UNM termotivasi untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan penguasaan materi bidang studi pada guru-guru sejarah, khususnya yang berkaitan dengan Kompetensi Dasar bidang sejarah. Masalahnya adalah pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru

melalui jalur formal, dalam hal ini seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan pembiayaan pemerintah dan/atau pemerintah daerah frekuensinya sangat terbatas. Pada sisi lain, sekolah-sekolah belum memiliki program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan secara terencana dan menjadi bagian dari program sekolah. Masalah lainnya adalah forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tidak efektif sebagai wadah pengembangan mengingat sumber daya manusia yang relatif terbatas sehingga penting untuk Peningkatan Pemahaman Peran Dan Nilai-Nilai Perjuangan Tokoh Nasional Bung Karno Dan Hatta Sebagai Proklamator Bagi Guru Sejarah Sma Se-Kabupaten Polewali Mandar.

## METODE

Metode pelaksanaan program kemitraan masyarakat tentunya ditunjang dengan kelayakan Perguruan Tinggi, dalam hal ini khususnya kelayakan pengusul program kemitraan masyarakat, adalah sangat layak. Kelayakan ini terlihat dari dua indikator. Pertama, kedua pengusul baik ketua maupun anggota adalah dosen Jurusan Sejarah. Kedua, Pengusul pertama adalah spesialis pada bidang ilmu pendidikan sejarah, pengusul kedua adalah Magister pada Jurusan Pendidikan Sejarah. Dengan demikian, kedua pengusul sangat berkompeten memberikan pelatihan tentang peningkatan penguasaan kompetensi dasar tentang Peningkatan Pemahaman Peran Dan Nilai-Nilai Perjuangan Tokoh Nasional Bung Karno Dan Hatta Sebagai Proklamator Bagi Guru Sejarah Sma Se-Kabupaten Polewali Mandar. Adapun metode pelaksanaan yang dapat menunjukkan indikasi kelayakan sebagai berikut :

1. Menyelesaikan semua urusan administrasi sebelum lapangan yakni mengurus izin pengabdian masyarakat pada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Makassar. Izin tersebut ditujukan kepada Dinas Pendidikan

Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar

2. Menyampaikan maksud dan tujuan sehubungan dengan pelaksanaan pelatihan guru-guru Sejarah SMA di Kabupaten Polewali Mandar
3. Melakukan presentasi dengan materi pelatihan kepada guru-guru SMA Mata Pelajaran Sejarah di Kabupaten Polewali Mandar

Rencana kegiatan akan berlangsung selama dua minggu. Namun secara operasional jadwal kegiatan akan ditetapkan kemudian apabila telah memperoleh persetujuan kontrak Program Kemitraan Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengingat kedudukan jabatan guru yang sangat strategis, baik dalam lingkup makro (pembangunan dan pendidikan nasional) maupun dalam lingkup mikro (proses pembelajaran di sekolah), maka pembinaan dan pengembangan profesi guru merupakan suatu keniscayaan. Konsiderans menimbang huruf b UU No.14 Tahun 2005 menegaskan bahwa “untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah dan berkesinambungan”. Pasal 7 ayat (2) UU RI No.14 Tahun 2005 menegaskan “pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi”.

Salah satu prinsip pengembangan profesi guru adalah kemandirian, dimana setiap guru secara terus menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan

kompetensinya secara berkesinambungan, sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya (Sudarwan Danim dan H. Khairil, 2013:40). Peningkatan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdian sebagai guru. Peningkatan dapat dilakukan secara formal melalui kegiatan penataran, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya, ataupun secara informal. (Somantri, O., Apriliani, D., Muhamad, A. W., & Nishom, M., 2019).

Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan latihan, (Soetjipto dan Raflis Kosasi, 1994:55). maupun di luar kegiatan pendidikan dan latihan. In-house training dapat dilakukan secara internal di kelompok kerja guru sebagai salah satu bentuk pendidikan dan latihan (Sudarwan Danim dan H. Khairil, 2013:41). Kegiatan pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru itu ada yang dilembagakan, ada pula yang bersifat individual. Prakarsa institusi atau lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru sangat penting lagi niscaya. Prakarsa itu sangat bermanfaat jika didukung oleh guru (Sudarwan Danim, 2011:188).

Pembinaan dan pengembangan profesi guru idealnya mencakup 4 (empat) kompetensi inti secara simultan, namun dalam penerapannya perlu memperhatikan skala prioritas mengingat pada tataran empirik usaha kegiatan dan/atau usaha pembinaan dan pengembangan terkendala oleh faktor-faktor sumber daya (dalam arti luas). Kompetensi inti yang mendesak untuk ditingkatkan adalah kompetensi profesional.

Kompetensi profesional guru, antara lain kemampuan menguasai bidang ilmu, sumber bahan ajaran, baik dari segi substansi dan metodologi bidang ilmu (*disciplinary content knowledge*), dan pengemasan bidang ilmu menjadi bahan ajar dalam kurikulum (*pedagogical content knowledge*). Salah satu aspek dari kompetensi profesional adalah menguasai bahan pengajaran (Moh. Uzer usman, 2001:18).

Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan sertifikasi guru baik pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri pendidikan, serta peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2009 menegaskan perlunya dilakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan profesional guru secara terencana dan berkesinambungan. Kegiatan pembinaan dan pengembangan dilakukan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, komunitas guru, dan masyarakat.

Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan dilaksanakan agar guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik.

Kompetensi profesional, antara lain mencakup menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif (H. Abd. Kadim Masaong, 2012: 94-95). (H. Isjoni 2006: 179) Hasil riset Badan Penelitian dan Pengembangan Diknas bahwa pemahaman para guru terhadap materi pelajaran relatif rendah.

*Gambar Pengabdian dilakukan dilapangan*



*Gambar 1: Tim Memberikan Materi dalam Pelatihan KTI*

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan ini, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi professional guru ini dapat dianggap berhasil baik antusiasme dari peserta dan kegiatan diskusi yang berlangsung dengan baik. Serta keberhasilan tersebut nampak pada beberapa hal sebagai berikut: 1) Banyaknya peserta yang menghadiri kegiatan tersebut. Disinilah kita memandang antusiasmenya guru-guru mata pelajaran Sejarah SMA di Kabupaten Polmas. 2) Antusiasme peserta yang begitu tinggi menggambarkan minat dan motivasi sehingga kegiatan semacam ini sangat dibutuhkan dan Post test yang dilakukan pada akhir kegiatan menunjukkan perubahan yang signifikan. Ternyata pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas khususnya kompetensi dasar tentang sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan menganalisis menganalisis peningkatan pemahaman peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh Nasional Bung Karno dan Hatta Sebagai Proklamator bagi Guru Sejarah SMA Se-Kabupaten Polewali Mandar dalam kehidupan bangsa

Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh guru untuk mengajar.

**Saran;** 1) Diharapkan kepada pihak mitra kerja untuk lebih memperluas cakupan kegiatan semacam ini pada masa yang akan datang. 2) Diharapkan kepada pihak LPM untuk mengalokasikan kembali dana untuk melakukan kegiatan serupa, mengingat tingginya animo, minat, motivasi peserta pelatihan

### **Ucapan terima kasih**

Syukur Alhamdulillah karena atas berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa sehingga kegiatan PKM ini dapat selesai seperti yang telah direncanakan. Keberhasilan inipun tak luput dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu patutlah kiranya jika kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 1) Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, 2) Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNM, 3) Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan 4) Ketua MGMP SMA Mata Pelajaran Sejarah Kabupaten Polman. 5) Anggota Tim Kami harapkan semoga hasil PKM bagi masyarakat ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk kepentingan bangsa dan Negara

## DAFTAR RUJUKAN

- H. Abd. Kadim Masaong, 2012. *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas guru*, Alfabeta, Bandung.
- Irwansyah, I., Mario, M., & Tamrin, S. (2019). Pelatihan Literasi Digital pada Komunitas Mata Literasi bagi Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Gowa. *Humanis*, 18 (1), 6-10.
- H. Isjoni, 2006. *Grukah yang disalahkan? Menakar Posisi guru Di Tengah Dunia Pendidikan Kita*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011. *Pedoman Rintisan Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi*.
- Masnur Muslich, 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Moh. Uzer Usman, 2001. *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Najamuddin, N., & Bustan, B. (2019). Peningkatan Penguasaan Kompetensi Dasar Tentang Menganalisis Dampak Politik, Budaya, Sosial, Dan Pendidikan Pada Masa Penjajahan Bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Pada Masa Kinibagi Guru Sejarah Sma Se-Kab Sulawesi Barat. *Humanis*, 18(1), 1-5.
- Soetjipto dan Rafli Kosasi, 1999. *Profesi Keguruan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Somantri, O., Apriliani, D., Muhamad, A. W., & Nishom, M. (2019). *Pembangunan Media Pembelajaran Berbasis E-Learning Di SMA NU Ma'Arif Jatinegara Tegal*. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 189-194.
- Sudarwan Danim, 2011. *Pengembangan Profesi Guru, dari Prajabatan, Induksi, ke Profesional Madani*, Predana Media Group, Jakarta.
- Sudarwan Danim dan H. Khairil, 2013. *Profesi Kependidikan*, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru